BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, semua tindakan di Indonesia diatur dan diikat oleh hukum. Hukum itu sendiri tidak hanya menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat, namun hukum juga harus benar-benar hidup dalam masyarakat guna menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pemenuhan haknya atas kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat. Oleh karena itu negara dan khususnya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak ini (*to protect and to fulfill*). Sebagai bentuk perlindungan dan perwujudan hak asasi warga negara (Marpaung, 2010).

Suatu konstitusi yang dijadikan sebagai acuan hukum tertinggi atau dasar (*Grundnorm*) dan sumber norma (*Unsprugnorm*) untuk seluruh hukum yang ada di Indonesia wajib dirancang untuk membentuk cara hidup orang dalam negara merdeka. Dalam konteks negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang memuat ciri-ciri pokok kehidupan nasional Indonesia serta merupakan norma dasar dan sumber hukum nasional terpenting di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengatur kepentingan yang berbeda dari masyarakat yang sangat beragam. Indonesia menghadapi tantangan

regional dan internasional yang dibawa oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi yang semakin maju. Hukum sebagai instrument perubahan sosial hadir sebagai konsep nyata yang berupaya membawa pada inti regulasi pemahaman tentang hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dengan mengutamakan kepentingan umum (Muladi, 1995, hal. IX).

Perkembangan hukum harus mampu terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang mengatur baik proses pembuatannya, isi materinya, dan penerapan hukum itu sendiri. Keberadaan hukum yang berkelanjutan memungkinkan adanya keseimbangan antara kehendak maupun kebutuhan guna perkembangan masyarakat yang selalu mencari kepastian, kebahagiaan, dan ketertiban. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana meliputi prosedur untuk mengatur serta menetapkan kekuasaan. Baik itu kedaulatan atau wewenang warga negara biasa untuk bertindak dalam interaksi dengan masyarakat maupun kedaulatan atau kewenangan otoritas publik atau penegak hukum. Hukum bukan sekedar kumpulan atau rangkuman aturan, melainkan hukum itu berdiri sendiri. Pentingnya kaidah hukum merupakan hubungan sistematis dengan peraturan hukum lainnya. (Krisnamurti, 2021, hal. 56).

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan yang dimaksud adalah suatu aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistematis. Memahami hakikat hukum tidak bisa hanya dengan memperhatikan satu peraturan

saja. Melainkan untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena bahwasannya peraturan-peraturan hukum diciptakan oleh manusia.

Moeljatno merumuskan bahwa hukum pidana adalah “sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana dengan yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut” (Nuraeny, 2022, hal. 58).

Untuk mencapai cita-cita hukum tersebut, diperlukan adanya suatu upaya guna menciptakan penyelesaian baru atau ide-ide yang sesuai, yang tidak bisa diatur oleh media lain. Melalui putusan Hakim diperlukan adanya pembaharuan demi mencapai tujuan hukum dan kepastian hukum, badan-badan yang berwenang menentukan peraturan atau undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk norma hukum seperti undang-undang (UU).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah sepakat dan berkomitmen untuk melakukan Protokol Parlemo dan telah berhasil meratifikasinya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4720. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UUPTPO. Tindak perdagangan orang itu sendiri merupakan perbuatan yang mengandung unsur pidana yang diatur dalam UUPTPO (Putri & Arifin, 2019, hal. 173).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pengertian perdagangan orang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern dan salah satu bentuk perlakuan terburuk atas pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling sering ditemukan dalam perdagangan manusia. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk prostitusi maupun berbagai eksploitasi seksual lainnya, seperti kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan manusia dapat merekrut, mengangkut atau memindahkan orang dengan tujuan menangkap, atau memanfaatkannya dengan segala bentuk praktik

eksploitasi, termasuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi uang atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan korban (Nugroho, 2018, hal. 544).

Moralitas manusia sangat mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, serta seringkali kita melihat perilaku masyarakat yang bertolak belakang dengan nilai maupun norma hukum yang tertulis, yaitu kejahatan. Meskipun hukum pidana materiil dan formil diterapkan untuk memberantas kejahatan, kejahatan terus terjadi bahkan meningkat dan sulit untuk dicegah. Ahli kriminologi mengubah objek penelitian dalam hal pencegahan kejahatan agar tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan. Sebaliknya, itu berfokus pada korban (*viktim*).

Masalah perdagangan orang (*humantrafficking*) tidak lagi masalah baru, melainkan sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang hingga kini belum ditangani secara memadai oleh setiap pemerintah nasional atau badan-badan internasional yang berwenang untuk mananganinya. Perdagangan manusia adalah kejahatan tertua di dunia dan masalah klasik yang berulang dari waktu ke waktu. Bahkan menempati urutan ketiga kejahatan internasional dengan keuntungan tertinggi di dunia setelah kejahatan perdagangan senjata ilegal dan perdagangan narkoba. (Zahra et al., 2020, hal. 124)

Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang merugikan korban kejahatan. Mengenai delik ini ada dasar pembentukan norma hukum yang

berkaitan dengan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

“Hak Untuk Hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Moh, 2012, hal. 20).

Oleh karena itu, negara dan khususnya pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melindungi dan menegakkan hak-hak ini sebagai bentuk perlindungan dan menegakan hak asasi warga negaranya. Upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban yang secara langsung maupun tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Korban selalu menjadi pihak yang paling menderita dalam sistem peradilan Indonesia. Keberpihakan hukum terhadap korban tampak tidak sebanding dengan tersangka (terdakwa). Hak-hak korban harus dilindungi secara khusus oleh hukum dalam isi normatif dari semua undang-undang yang disusun, diratifikasi, dan ditegakkan. Dengan tidak adanya perlindungan hukum khusus melalui peraturan perundang-undangan, hak-hak korban tidak bisa dipulihkan dengan lebih baik atau setidaknya sama seperti sebelum menjadi korban. Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang korban (*victim*) tidak saja menghilangkan hak asasi korban, akan tetapi juga mengakibatkan mereka lebih rawan terhadap pelecehan,

penyiksaan fisik dan kerja paksa. Hal ini dapat menimbulkan trauma psikologis, termasuk kecacatan dan kematian (Abdussalam, 2018, hal. 8).

Salah satu pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah untuk mencegah dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kewajiban nasional dan internasional, menindak pelaku, melindungi korban, dan penguatan kerjasama penanggulangan (bagian menimbang huruf d) (Krisnamurti, 2021, hal. 57).

Isu perbudakan modern telah menjadi sorotan dari berbagai pihak internasional maupun nasional. Pada bulan Januari 2022 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dari Migrant Care sehubungan dengan temuan yang mengarah pada dugaan perbudakan modern dan dugaan perdagangan orang oleh Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Migrant Care sebagai pengadu memberikan bukti permulaan berupa foto dan video kerangkeng besi menyerupai tahanan yang dihuni oleh manusia. Bangunan ini diduga digunakan untuk mengurung pekerja kebun kelapa sawit yang diperkerjakan di lahan milik Bupati Langkat (HAM, 2022, hal. 1).

Terminologi pembinaan menjadikan kerangkeng manusia ini terdengar sangat mulia, padahal kehadiran para korban di kerangkeng manusia ini bukanlah paksaan tetapi tipuan dalam 'isitilah' pembinaan. Hal ini yang membuat pihak keluarga korban yang mayoritas berada dari kalangan ekonomi lemah, mengalami keputusaan keluarga akhirnya mendorong bahkan memaksa anggota keluarganya. Kebanyakan korban merupakan mantan pecandu narkoba, mantan pelaku kriminal,

melakukan kenakalan remaja, hingga yang terlibat masalah dengan Terbit Rencana Perangin Angin untuk masuk kerangkeng ini.

Istilah pembinaan ini juga justru berhasil menciptakan stigma yang baik dan korban memberikan persetujuan dalam bentuk surat yang tertulis. Pembinaan yang dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin Angin tidak lain adalah pekerjaan paksa dengan kekerasan. Penghuni kerangkeng dapat dikatakan diperkerjakan secara cuma-cuma di pabrik dan perkebunan kelapa sawit sebagai tukang kebun, pembersih, pekerja bangunan, pengikis tanah, penjaga taman, dll secara gratis, atau dapat dikatakan upah dibayarkan dalam bentuk fasilitas hidup di kerangkeng. Di kerangkeng milik Terbit Rencana Perangin Angin ini tidak berhenti sampai disitu, berdasarkan fakta di lapangan setidaknya terdapat 26 bentuk kekerasan yang dilakukan, termasuk pemukulan, pencambuk, pencabutan kuku jari dengan tang, dan pembakaran dengan besi panas. Di sekitar kerangkeng manusia ada dua makam korban meninggal yang penyebab pasti kematiannya tidak diketahui (Edelweis, A C ; Natallina, C D ; Minar, 2022).

Perdagangan manusia dan kerja paksa di kapal penangkap ikan adalah dua bentuk perbudakan modern. Pada tahun 2020 ditemukan awak kapal yang terjun dari kapal Qian Yua Yu 901 yang berasal dari China di Selat Malaka. Ditemukan adanya kekerasan, intimidasi, dan kerja paksa serta gaji yang tidak dibayar selama awak kapal tersebut bekerja. Sehingga dari adanya peristiwa tersebut menjadi faktor utama para awak kapal melarikan diri dengan cara melompat ke laut.

Agen penyalur berinisial SYF yang berasal dari PT Duta Putra Group merekrut ABK yang berasal dari Indonesia dengan menjanjikan akan dipekerjakan

di sebuah perusahaan Korea Selatan dengan gaji sebesar Rp 25 juta per bulan, sebagai syaratnya mereka harus membayar Rp 40 juta dan Rp 45 juta kepada SYF. Berbeda dengan realitanya mereka justru dijadikan ABK di kapal penangkap ikan China dan diperlakukan dengan tidak selayaknya. Dari peristiwa tersebut merepresentasikan pola umum praktik perbudakan modern dan kerja paksa dalam industri perikanan. Laporan International Organisation for Migration (IOM) berpendapat bahwa para pelaku umumnya menerapkan pola dengan kendali-kendali sebagai berikut (Muamar; Abdul, 2022, hal. 1) :

1. Tipu daya sejak awal yang mencegah para korban untuk mengetahui keadaan pekerjaan yang sebenarnya.
2. Ancaman-ancaman kekerasan, umumnya berupa penyiksaan fisik dan psikologis saat sudah berada di kapal.
3. Kekerasan dalam bentuk kurungan fisik dan penyitaan dokumen yang membatasi kebebasan bergerak korban.
4. Jeratan utang yang menjebak korban.

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Melihat fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan analisis tentang **“Tinjauan Perbudakan Modern Menurut Perspektif Hukum Dan Viktimologis”** dengan fokus permasalahan tertuju kepada peranan korban sehingga terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbudakan modern menurut perspektif hukum?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi perbudakan modern orang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Identifikasi Masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perbudakan modern menurut perspektif hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi perbudakan modern di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat ditarik dari penelitian ini yakni:

1. Kegunaan Teoritis yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi penambah referensi dan sebagai bahan masukan

ilmu hukum dibidang pidana, dalam hal ini upaya perlindungan hukum terhadap korban perbudakan modern.

2. Kegunaan Praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni bisa menambah referensi sebagai masukan kepada pihak berwenang dalam perlindungan hukum terhadap korban perbudakan modern dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan korban.

E. Kerangka Pemikiran

Sumber dari segala sumber hukum Indonesia adalah Pancasila, sila-sila Pancasila ini terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepadaa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara jelas merupakan salah satu komponen yang dilindungi, selain perlindungan kedaulatan dan sumber daya alam (Undang-Undang Dasar, 1945).

H.R. Otje Salman dan Anton F Susanto, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke IV menegaskan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditunjukkan untuk tujuan tertentu” (Salman, H R Otje; Susanto, 2014, hal. 156).

Indonesia adalah negara hukum yang membuat peraturan perundang-undang yang sesuai dengan masyarakat dan berlaku untuk seluruh warga negara.

Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 alinea IV, yaitu:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Bahwasannya dalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Makna dan arti pekerjaan dan penghidupan yang layak dirumuskan secara jelas dalam konstitusi.

Pasal 28 (D) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Hak atas status kewarganegaraan (Yusitarani, 2020, hal. 28).

Pasal 28 (J) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Asas legalitas berperan penting dalam hukum pidana. Asas ini tidak saja menjadi dasar penyusunan berbagai undang-undang dan sebagai tumpuan bagi aparat penegak hukum guna memenuhi kepastian hukum yang dilakukan oleh para

pelanggar hukum, tetapi juga menjadi dasar hakim dalam peran dan putusannya dalam hukum pidana. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan yang tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undang (Moeljatno, 2005).

Perdagangan orang atau dengan nama lain Human Trafficking, adalah perilaku yang melanggar harkat dan martabat manusia serta Hak Asasi Manusia. Perilaku ini meluas dalam berbagai bentuk dan jaringan kegiatan baik yang teroganisir maupun yang tidak teroganisir di seluruh dunia yang pada akhirnya mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Munthe, 2015, hal. 7).

Disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa dalam undang-undang ini diatur pula ancaman pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan perdagangan orang. Selain itu korban memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan restitusi dari pelaku. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melindungi korban, saksi, dan pelapor. Selain itu hukum pidana Indonesia mengatur pemberatan hukum dalam kasus perdagangan orang. Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus TPPO saat ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang telah diatur yaitu UU PTPPO. (Siswanto, 2013).

Rahayu dalam tulisannya mengenai perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berpendapat bahwa (Rahayu, n.d., hal. 1):

“Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam wujud perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi, yaitu gagasan bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.”

Secara yuridis, pengertian korban dapat temukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014: “Korban adalah seseorang yang secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut”. Dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
3. Akibat dari tindak pidana

Hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban akibat dari suatu tindak kejahatan. Dari rumusan tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban “murni” dari suatu kejahatan. Korban tidak bersalah melainkan semata mata hanya korban, kemungkinan salah satu pihak menjadi korban karena beberapa alasan, antara lain; ketidaktahuan, kecerobohan, kelalaian, kelemahan pihak korban atau nasib buruk pihak korban (Yulia, 2020, hal. 36).

Menurut Bambang Waluyo (Waluyo, 2011, hal. 18):

“Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan”

Beberapa tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

1. *Primary Victimization*, korban hanya satu orang atau biasa disebut dengan perorangan.
2. *Secondary Victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah kelompok.
3. *Tertiary Victimization*, korbannya merupakan masyarakat secara luas.
4. *Mutual Victimization*, disini korban adalah pelaku kejahatan itu sendiri.
5. *No Victimization*, yang dimaksud disini adalah korbannya belum segera diketahui. (Muhadar, 2006)

Pentingnya melindungi masyarakat terutama korban dari tindak kejahatan merupakan salah satu alasan utama pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pelaksanaan ketentuannya LPSK melakukan:

1. Merumuskan kebijakan perlindungan saksi dan korban;
2. Melindungi saksi dan korban;
3. Memberikan kompensasi, penggantian, dan dukungan terhadap saksi dan/atau korban;
4. Realisasi kerja informasi dan kehumasan;
5. Kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga pendidikan pelatihan;
6. Pemantauan, pelaporan, investigasi, dan pengembangan;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Selanjutnya definisi korban juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan ini menyatakan bahwa “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun” (Indah, 2016, hal. 17).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang diperlukan oleh penulis dengan mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut (Yadiman, 2019, hal. 9).

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini mengutip dari SoejonoSoekanto berdasarkan deskriptif analitis (Soekanto, 2007, hal. 14):

“Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana”.

Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian mengenai Tinjauan Mengenai Perbudakan Modern Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologi untuk kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum (S. Soekanto, 1984, hal. 53).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif karena pada penelitiannya mengkaji peraturan perundang-undangan, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan data primair dan data sekunder. Dan pendekatan yang hendak digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dengan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan Tahapan Penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data sekunder berupa fakta teoritis, pendapat ahli dan yurisprudensi, sebagai kekuatan mengikat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu primer, sekunder dan tersier. Cara mendapatkan informasi tentang hal diatas penulis harus menggali literatur. (W, 2007, hal. 18).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini mengikuti narasumber tertentu dan spesifik untuk berbicara langsung kepada para pemangku kepentingan

penelitian ini yang terkait langsung dengan topik masalah dan memerlukan pengumpulan data wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang membantu penulis guna mengumpulkan informasi yang diperoleh untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis membuat katalog dan mengarsipkan semua bahan, literature, dan referensi yang berasal dari bahan penelitian kepustakaan.

a. Studi Dokumen

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi.
2. Bahan Hukum Sekunder, publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan lain terkait topik yang menyajikan informasi tentang bahan hukum primer maupun sekunder meliputi ensiklopedia.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara orang-orang yang saling berhadapan secara langsung pada saat pewawancara memberikan pertanyaan yang bertujuan agar dapat memperoleh jawaban yang relevan atas permasalahan penelitian terhadap responden (Z, 2012).

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Hasil Penelitian Kepustakaan

Tujuannya adalah untuk menelaah teori serta gagasan yang berkenaan dengan penelitian yang dibutuhkan oleh penulis. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang penulis dapatkan dari buku, perundang-undangan ataupun literatur.

b. Alat Pengumpulan Data Hasil Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, oleh karena itu diperlukan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber yang diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini penulis gunakan untuk melakukan pengolahan data yang berasal dari studi lapangan dan studi pustaka dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Metode Yuridis

Kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendapat ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Saleh Adiwiyata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban). Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Ciracas Jakarta Timur 13750.